



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1271, 2014

KEMENDAG. Lembaga. Resi Gudang. Seleksi.
Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52/M-DAG/PER/9/2014
TENTANG
TATA CARA SELEKSI LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN
SISTEM RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5503);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA SELEKSI LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jaminan Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Jaminan adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.
2. Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Pelaksana adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan.
3. Seleksi Lembaga Pelaksana yang selanjutnya disebut Seleksi adalah proses pemilihan lembaga atau badan usaha yang akan menjadi Lembaga Pelaksana.
4. Tim Seleksi Lembaga Pelaksana yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang melaksanakan proses Seleksi Lembaga Pelaksana.
5. Peserta Seleksi Lembaga Pelaksana yang selanjutnya disebut Peserta Seleksi adalah lembaga atau badan usaha yang mengikuti Seleksi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Seleksi dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian kompetensi.
- (2) Seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri tersendiri.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tim Seleksi terdiri atas wakil dari:
 - a. Kementerian Perdagangan;
 - b. Kementerian Sekretariat Negara;
 - c. Kementerian Keuangan;
 - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Tim Seleksi diketuai oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan.
- (3) Tim Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan.

Pasal 4

- (1) Tim Seleksi mengumumkan kesempatan pendaftaran untuk mengikuti Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui *website* Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pengumuman yang telah ditetapkan lembaga atau badan usaha yang mengajukan pendaftaran kurang dari 2 (dua), Tim Seleksi dapat mengundang lembaga atau badan usaha yang memiliki kompetensi untuk mengikuti Seleksi.

Pasal 5

- (1) Untuk mengikuti Seleksi, lembaga atau badan usaha mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan selaku Ketua Tim Seleksi dengan menggunakan format huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen persyaratan:
 - a. fotokopi akta pendirian beserta seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fotokopi surat izin teknis dari instansi yang berwenang;

- d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - e. profil lembaga atau badan usaha yang paling sedikit mengenai visi dan misi, deskripsi bisnis, landasan hukum, struktur permodalan (ekuitas), alamat kantor pusat dan kantor cabang, daftar nama berikut data anggota direksi dan komisaris, jasa yang diberikan, dan jumlah pekerja.
- (3) Tim Seleksi melakukan penilaian administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Tim Seleksi membuat berita acara hasil penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan format huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Tim Seleksi mengumumkan hasil penilaian administrasi terhadap Peserta Seleksi melalui *website* Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 6

- (1) Peserta Seleksi yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan dokumen persyaratan kepada Ketua Tim Seleksi untuk dilakukan penilaian kompetensi.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. proposal yang memuat rencana kerja pelaksanaan penjaminan dalam Sistem Resi Gudang;
 - b. rencana pembentukan struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Lembaga Jaminan Resi Gudang;
 - c. deskripsi mengenai pengalaman di bidang penjaminan calon Lembaga Pelaksana;
 - d. narasi dan/atau penjelasan mengenai kegiatan dari Lembaga atau Badan Usaha calon Lembaga Pelaksana yang terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang;
 - e. deskripsi mengenai kesiapan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan dalam operasional Lembaga Pelaksana;
 - f. deskripsi mengenai sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang; dan
 - g. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, serta keterangan tentang permodalan.
- (3) Dalam hal diperlukan untuk penilaian kompetensi, Tim Seleksi dapat melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh calon Lembaga Pelaksana.

- (4) Tim Seleksi membuat berita acara hasil pemeriksaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan format huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Hasil akhir Seleksi ditetapkan oleh Tim Seleksi dalam berita acara dengan menggunakan format huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tim Seleksi menyampaikan hasil akhir Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri menyampaikan hasil akhir Seleksi kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan atas hasil akhir Seleksi.

Pasal 8

Tim Seleksi mengumumkan Lembaga Pelaksana yang telah ditetapkan melalui *website* Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2014
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 52/M-DAG/PER/9/2014
 TENTANG
 TATA CARA SELEKSI LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG

A. Permohonan Pendaftaran Penilaian Administrasi

(dibuat di atas kertas kop calon Lembaga Pelaksana)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Penilaian Administrasi
 Sebagai Lembaga Pelaksana

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 Kementerian Perdagangan
 Selaku Ketua Tim Seleksi Lembaga Pelaksana
 di Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Direksi/Pengurus*) bertindak untuk dan atas nama lembaga atau badan usaha*) mengajukan permohonan pendaftaran untuk mengikuti Penilaian Administrasi sebagai Lembaga Pelaksana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .../M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Nama Jelas

*) Pilih salah satu

B. Berita Acara Penilaian Administrasi

BERITA ACARA
PENILAIAN ADMINISTRASI CALON LEMBAGA PELAKSANA

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun
di yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. Nama :
Jabatan :
4. Nama :
Jabatan :
5. Nama :
Jabatan :

Sesuai dengan surat tugas dari Ketua Tim Seleksi Nomor tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan dokumen administrasi yang dimiliki oleh lembaga atau badan usaha calon Lembaga Pelaksana*) untuk melakukan kegiatan sebagai Lembaga Pelaksana.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Ketua Tim Seleksi

meterai

(Nama Jelas)

Tim Pemeriksa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

*) Pilih salah satu

C. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SARANA DAN PRASARANA CALON LEMBAGA PELAKSANA

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun
di yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. Nama :
Jabatan :
4. Nama :
Jabatan :
5. Nama :
Jabatan :

Sesuai dengan surat tugas dari Ketua Tim Seleksi Nomor tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang dimiliki oleh Lembaga Atau Badan Usaha calon Lembaga Pelaksana*) untuk melakukan kegiatan sebagai Lembaga Pelaksana.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
Pengurus Lembaga/Badan Usaha*),

meterai
(Nama Jelas)

Tim Pemeriksa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

*) Pilih salah satu

D. Berita Acara Hasil Seleksi Calon Lembaga Pelaksana

BERITA ACARA
HASIL SELEKSI LEMBAGA PELAKSANA

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun di yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. Nama :
Jabatan :
4. Nama :
Jabatan :
5. Nama :
Jabatan :

Sesuai dengan surat tugas dari Ketua Tim Seleksi Nomor tanggal, dan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang, kami telah:

- a. memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- b. melakukan penilaian atas pengalaman di bidang penjaminan terhadap calon Lembaga Pelaksana;
- c. melakukan penilaian atas kapasitas dan kapabilitas calon Lembaga Pelaksana di bidang Penjaminan dan Sistem Resi Gudang;
- d. melakukan penilaian proposal yang memuat rencana kerja untuk pengembangan dan keamanan Sistem Resi Gudang; dan
- e. memeriksa sarana dan prasarana fisik mengenai sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang, dan kesiapan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan dalam operasional Lembaga Pelaksana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, berikut ini adalah hasil seleksi dan penilaian calon Lembaga Pelaksana:

No.	Nama Calon Lembaga Pelaksana	Penilaian Sumber Daya Manusia (<i>Man</i>)	Penilaian Metode / Tata Cara Kerja (<i>Method</i>)	Penilaian Sarana dan Prasarana (<i>Machine</i>)	TOTAL PENILAIAN
1.					
2.					
3.					
4.					

5.					
----	--	--	--	--	--

Demikian Berita Acara Hasil Seleksi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Ketua Tim Seleksi

Meterai

(Nama Jelas)

Anggota Tim Seleksi

1.

2.

3.

4.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,

MUHAMMAD LUTFI

LASMININGSIH